

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil**

Berdasarkan hasil pengamatan di Balai Desa Fajar Baru, terdapat beberapa peraturan yang harus dijalankan setiap instansi guna meningkatkan kualitas kerja bagi seluruh karyawan, berikut Standar Operasional Perusahaan menurut Undang Undang (UU) :

#### **UU No. 11 tahun 2019**

#### **Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jairngan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****No. 31 Tahun 2006****Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional**

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
3. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Sesuai dengan analisis permasalahan yang ada tentang peraturan pemerintah dan UU dimana karyawan berhak mendapatkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan penunjang dalam bekerja, serta teknologi penunjang untuk meningkatkan kualitas kerja. Karyawan juga berhak mendapatkan sarana dan prasarana di bidang teknologi sehingga pelayanan publik yang dihasilkan optimal. Selama pelaksanaan kerja praktek di Balai Desa Fajar Baru saya menemukan bahwa kebutuhan teknologi penunjang karyawan selama melakukan tugas pekerjaannya masih kurang memadai disetiap bagian divisi, sehingga dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat memakan waktu yang cukup lama, dan teknologi yang digunakan

Balai Desa guna pengawasan terhadap setiap karyawan masih sangat kurang, contohnya adalah sistem absensi yang sangat bisa mudah disalah gunakan.

Sistem pelatihan untuk para karyawan guna meningkatkan kualitas masih belum jelas dan belum terencana, kesadaran para karyawan untuk meningkatkan keahliannya harus dibantu dengan kesadaran setiap pemerintah daerah untuk memfasilitasi mengembangkan soft skill dibidang teknologi, karena sistem yang dibuat secara terencana dapat memudahkan sistem birokrasi di dalam pemerintahan hingga kebawahnya.

## 4.2 Pembahasan

Balai Desa Fajar Baru harus menjalankan peraturan berdasarkan UU No. 11 tahun 2019 guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mengadakan pelatihan berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia No. 31 Tahun 2006.

### 1. Kelebihan Penggunaan Teknologi

- a. mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis dan lain-lain.
- b. Waktu yang diperlukan untuk menegerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dan memperpendek rantai birokrasi.
- c. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena dengan teknologi data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat.
- d. Meminimalisir kecurangan yang bisa dilakukan karyawan.
- e. Sistem akan dapat terintegrasi disemua kantor sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam respon sesuatu.

### 2. Kelemahan Penggunaan Teknologi

- a. Kemajuan teknologi akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan karna semakin mudahya mengakses data.
- b. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya *cyber crime* yang dapat merusak sistem pemerintahan.